

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Stunting merupakan permasalahan kesehatan global pada masa ini. Kondisi ini terjadi akibat kekurangan nutrisi jangka panjang dan infeksi penyakit berulang, terutama pada seribu hari pertama kehidupan pertumbuhan dan perkembangan anak. Anak stunting tinggi badan tidak sesuai dengan standarnya, bahkan bisa juga menghadapi dampak lain yang lebih luas, seperti hambatan dalam perkembangan kognitif, menurunnya potensi produktivitas di masa depan, serta resiko terkena penyakit ketika mereka dewasa, seperti penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung (WHO, 2021).

Berbagai faktor utama berperan dalam tingginya angka stunting, di antaranya adalah kurangnya asupan gizi yang memadai selama kehamilan dan setelah bayi lahir, buruknya kondisi sanitasi dan lingkungan yang meningkatkan risiko infeksi, serta keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, seperti pemeriksaan kehamilan dan imunisasi. Selain itu, penyebab lainnya adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap makanan bergizi dan pemberian ASI eksklusif. Ketidakseimbangan dalam aspek-aspek ini dapat mengakibatkan gangguan pertumbuhan yang bersifat permanen, sehingga hambatan perkembangan intelektual lebih mungkin terjadi pada anak-anak yang stunting. Akibatnya, mereka menghadapi kesulitan dalam mencapai prestasi akademik yang baik, memiliki peluang kerja yang lebih terbatas di masa depan, dan berisiko terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang sulit diputus (WHO, 2021).

Berdasarkan WHO, 2020 menunjukkan angka prevalensi stunting di tingkat global masih tergolong tinggi, dengan prevalensi mencapai 22% dari total anak di bawah usia lima tahun. Jumlah ini setara dengan sekitar 149,2 juta anak yang mengalami kondisi tersebut (WHO, 2020). Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Indonesia masih termasuk dalam sepuluh negara dengan tingkat stunting tertinggi. sehingga diperlukan peningkatan intervensi program percepatan untuk mengatasi masalah ini. Salah satu prioritas nasional yaitu upaya percepatan penurunan prevalensi stunting guna mengoptimalkan manfaat bonus demografi

pada tahun 2035. Untuk itu, pemerintah menetapkan kebijakan percepatan penurunan stunting yang dilaksanakan secara terkoordinasi dengan melibatkan berbagai lembaga dan organisasi terkait (WHO, 2023).

Berdasarkan SSGI 2023, prevalensi stunting di Indonesia mengalami penurunan dari 21,6% pada tahun 2022, menurun menjadi 18,3% pada tahun 2023. Meskipun demikian, Berdasarkan SSGI 2024 prevalensi stunting nasional berada pada angka 19,8%, yang berarti mengalami kenaikan. Survey itu masih lebih tinggi dibandingkan tujuan nasional sebesar 14% ditetapkan untuk tahun 2024. (Kemenkes, 2024).

Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2024 oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, prevalensi stunting nasional berada pada angka 19,8%. Tabel 1.1 menunjukkan bahwa berdasarkan SSGI ini terdapat 25 Provinsi di Indonesia mengalami penurunan stunting dan 13 Provinsi yang mengalami peningkatan pada (Tabel 1.2). Selisih penurunan prevalensi stunting rata-rata 5 persen dari 25 Provinsi yang mengalami penurunan stunting, terdapat Provinsi Papua Tengah yang memiliki rata-rata penurunan prevalensi sebesar 6.9 persen (Tertinggi) dan Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan prevalensi stunting sebesar 5,8 persen (Tertinggi kedua). Selain itu empat Provinsi lainnya secara berturut-turut yang mengalami selisih penurunan (Tertinggi ketiga) yaitu Provinsi Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Papua. Sementara itu Provinsi yang mengalami stunting dibawah rata-rata seperti, DKI Jakarta dan Nusa Tenggara Timur yang selisihnya terbawah dari rata-rata 5 persen. Bisa dilihat pada tabel 1.1 berikut :

Tabel 1. 1
Penurunan Stunting Nasional SSGI Provinsi 2023-2024

No	Provinsi	2023 (%)	2024 (%)	Selisih (%)
1	Nusa Tenggara Timur	37,9	37,5	0,4
2	Papua Tengah	39,4	32,5	6,9
3	Papua Barat Daya	31,0	30,5	0,5
4	Aceh	29,4	28,6	0,8
5	Sulawesi Tengah	27,2	26,1	1,1
6	Sulawesi Tenggara	30,0	26,1	3,9
7	Papua	28,6	24,7	3,9
8	Papua Barat	28,0	24,6	3,4

9	Gorontalo	26,9	23,8	3,1
10	Sulawesi Selatan	27,4	23,3	4,1
11	Maluku Utara	23,7	23,2	0,5
12	Kalimantan Selatan	24,7	22,9	1,8
13	Kalimantan Timur	22,9	22,2	0,7
14	Kalimantan Tengah	23,5	22,1	1,4
15	Banten	24,0	21,1	2,9
16	Sulawesi Utara	21,3	20,8	0,5
17	Kep. Bangka Belitung	20,6	20,1	0,5
18	Bengkulu	20,2	18,8	1,4
19	DI Yogyakarta	18,0	17,4	0,6
20	DKI Jakarta	17,6	17,3	0,3
21	Jawa Tengah	20,7	17,1	3,6
22	Jawa Barat	21,7	15,9	5,8
23	Sumatera Selatan	20,3	15,9	4,4
24	Kepulauan Riau	16,8	15,0	1,8
25	Jawa Timur	17,7	14,7	3,0
	Rata-Rata			5,0

Sumber : Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2024

Selanjutnya dapat dilihat data terkait Provinsi yang memiliki peningkatan stunting nasional yang didapatkan dari 13 Provinsi sebagaimana terlihat pada tabel 1.2 Berikut :

Tabel 1. 2
Peningkatan Stunting Nasional SSGI Provinsi 2023-2024

No	Provinsi	2023 (%)	2024 (%)	Selisih (%)
1	Papua Pegunungan	37,3	40,0	2,7
2	Sulawesi Barat	30,3	35,4	5,1
3	Nusa Tenggara Barat	24,6	29,8	5,2
4	Maluku	28,4	28,4	0,0
5	Kalimantan Barat	24,5	26,8	2,3
6	Papua Selatan	25,0	25,7	0,7
7	Sumatera Barat	23,6	24,9	1,2
8	Sumatera Utara	18,9	22,0	3,1
9	Riau	13,6	20,1	6,5
10	Kalimantan Utara	17,4	17,6	0,2
11	Jambi	13,5	17,1	3,6
12	Lampung	14,9	15,9	1,0
13	Bali	7,2	8,7	1,5
	Rata-Rata			5,0

Sumber : Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2024

Berdasarkan Tabel 1.2, menunjukkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2023 – 2024, terdapat 13 Provinsi yang memiliki angka peningkatan stunting. Selisih kenaikan prevalensi stunting di atas rata-rata 5% antara lain Provinsi Riau dengan (Tertinggi Pertama) sebesar 6,5 persen, NTB 5,2 persen (Tertinggi kedua), dan Sulawesi Barat sebesar 5.1 persen dengan Tertinggi ketiga (SSGI, 2024). Sementara itu Provinsi yang mengalami peningkatan stunting yang paling sedikit dibawah rata-rata 5 persen seperti, Maluku dan Kalimantan Utara yang selisihnya terbawah dari rata-rata 5 persen.

Peningkatan prevalensi stunting pada anak disebabkan daya tahan tubuh rendah, sehingga lebih mudah terserang penyakit menular. Selain itu, mereka juga mengalami kendala dalam perkembangan kognitif dan intelektual. Mengingat dampak jangka panjang yang cukup serius, anak-anak dengan kondisi ini memerlukan perhatian serta dukungan berkelanjutan, baik melalui intervensi gizi yang tepat, pemantauan kesehatan secara intensif, maupun edukasi bagi orang tua dan lingkungan sekitar. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa mereka menerima perawatan dan asupan gizi yang sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan mereka (Kementerian Kesehatan RI, 2015).

Menurut data dari (BKKBN, 2024), unsur utama yang menyebabkan stunting di Indonesia meliputi pola asuh yang tidak tepat sebesar 50%, infeksi berulang sebanyak 30%, serta faktor ekonomi yang menyumbang 20%. Dari data yang ada penelitian ini akan melihat bagaimana “demografi, sosial, dan ekonomi yang berperan dalam mendukung keberhasilan Program Percepatan Penurunan Stunting (PPPS) (Peraturan Kepala BKKBN Nomor 12 Tahun 2021).

Stunting bukanlah kondisi yang bukan karena satu hal saja, tetapi karena berbagai faktor yang saling berkaitan dan berkontribusi secara kompleks terhadap gangguan pertumbuhan pada anak. Beberapa faktor utama yang meningkatkan risiko stunting meliputi aspek ekonomi, sosial, dan pendidikan, yang dapat menimbulkan dampak baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kesehatan anak sejak dalam kandungan hingga masa pertumbuhannya.

Faktor ekonomi memiliki peran penting dalam menentukan kemampuan sebuah keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar anak, seperti akses tentang

makanan bergizi, layanan kesehatan yang memadai, serta lingkungan yang sehat dan layak huni. Keluarga dengan kondisi ekonomi rendah sering kali mengalami keterbatasan dalam menyediakan pangan berkualitas tinggi, yang berakibat pada kurangnya asupan gizi yang dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan anak secara optimal. Tambahan juga faktor sosial dan budaya juga turut berkontribusi terhadap peningkatan atau penurunan angka stunting di suatu wilayah. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pola makan sehat, mendapatkan ASI secara eksklusif, dan praktik sanitasi yang baik dapat menjadi kendala dalam upaya pencegahan stunting. Di beberapa komunitas, masih terdapat kebiasaan atau kepercayaan yang kurang mendukung praktik gizi yang optimal bagi ibu hamil dan anak, sehingga memperburuk kondisi malnutrisi dan meningkatkan risiko terjadinya stunting.

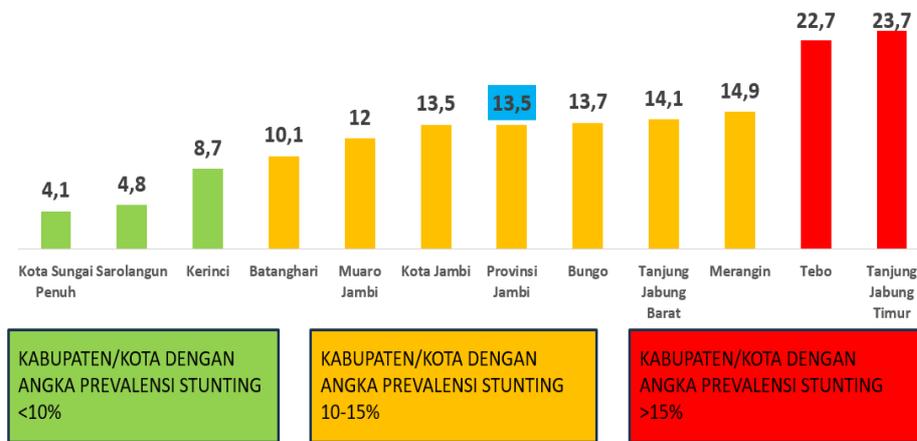
Faktor pendidikan juga memiliki dampak yang signifikan, terutama dalam meningkatkan pemahaman ibu mengenai gizi, kesehatan, dan pola pengasuhan yang baik. Ibu yang berpendidikan tinggi cenderung lebih menyadari pentingnya memberikan makanan bergizi, memanfaatkan layanan kesehatan, serta menerapkan pola asuh yang sepenuhnya mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak. Sebaliknya, ibu yang pendidikannya kurang mungkin memiliki keterbatasan informasi mengenai pentingnya asupan nutrisi seimbang bagi anak, karena hal itu dapat meningkatkan kemungkinan stunting dalam keluarga.

Dengan demikian, stunting adalah permasalahan yang bersifat multidimensional dan tidak dapat diatasi dengan satu pendekatan saja. Diperlukan intervensi yang menyeluruh, terkoordinasi, dan melibatkan berbagai sektor guna menangani akar penyebabnya secara efektif. Pemerintah, lembaga kesehatan, sektor swasta, serta masyarakat harus berkolaborasi dalam meningkatkan kesadaran, memperluas akses terhadap pangan bergizi, memperbaiki layanan kesehatan ibu dan anak, serta memastikan bahwa semua bayi memiliki peluang untuk berkembang secara optimal tanpa terhambat oleh kekurangan gizi (Yusrizal, 2008).

Di tingkat Provinsi Jambi, berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Jambi tahun 2023–2024, prevalensi stunting di Kota Jambi mengalami kenaikan

dari 13,5% pada tahun 2023 menjadi 17,1% pada tahun 2024, menunjukkan peningkatan sebesar 3,6%. Hal ini menandakan bahwa upaya penanggulangan stunting di tingkat provinsi masih perlu diperkuat dan difokuskan secara lebih spesifik, baik dari sisi kebijakan maupun pelaksanaan di lapangan.

Informasi tersebut disampaikan melalui surat Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Nomor S-050/1684/BAPPEDA-3.2/VI/2022 mengenai target penurunan stunting di wilayah tersebut.



Sumber : Survey Kesehatan Indonesia, 2024

Gambar 1. 1
Angka Prevalensi dan Target Penurunan Prevalensi Stunting di Provinsi Jambi Tahun 2024

Pemerintah Provinsi Jambi, bersama dengan pemerintah daerah setempat, menetapkan target prevalensi stunting untuk 11 kabupaten/kota. Berdasarkan Survey kesehatan Indonesia, 2023 prevalensi stunting di berbagai daerah di Provinsi Jambi dikategorikan ke dalam tiga zona berdasarkan tingkat keparahannya. Zona hijau, yang mencakup daerah dengan prevalensi stunting dari 100 kasus penyakit yang di bawah 10% yaitu sebesar 4,1 dari seluruh balita di Kota Sungai Penuh dan 4,8 dari seluruh balita di Sarolangun.

Zona kuning, dengan prevalensi stunting antara 10-15%, meliputi Batanghari, Muaro Jambi, Kota Jambi, Bungo, Tanjung Jabung Barat, dan Merangin yang berasal dari 100 kasus penyakit. Sementara itu zona merah, yaitu wilayah dengan prevalensi stunting dari 100 kasus penyakit terdapat 22,7 di Tebo

dan Tanjung Jabung Timur 23,7 ini berarti Kabupaten Tebo rendah dibandingkan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Secara keseluruhan, angka prevalensi stunting di Provinsi Jambi mencapai 13,5%, yang masih tergolong dalam kategori zona kuning. Kota Sungai Penuh dan Sarolangun menunjukkan keberhasilan dalam upaya penanggulangan stunting. Sebaliknya, Tebo dan Tanjung Jabung Timur memiliki prevalensi tertinggi, dengan lebih dari 22% anak mengalami stunting.

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Jambi tahun 2023–2024, angka prevalensi stunting mengalami kenaikan dari 13,5% pada tahun 2023 menjadi 17,1% pada tahun 2024, menunjukkan peningkatan sebesar 3,6%.

Berdasarkan data Bappeda Provinsi Jambi, jumlah stunting dari 11 Kecamatan di Kota Jambi, seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel 1. 3
Persentase dan Jumlah Stunting Pada Kecamatan di Kota Jambi

No	Kecamatan	Jumlah Stunting	Persentase (%)
1	Alam Barajo	19 orang	6,14
2	Jambi Selatan	18 orang	5,9
3	Paal Merah	41 orang	13,4
4	Jelutung	77 orang	25
5	Pasar Jambi	7 orang	2,3
6	Telanai Pura	17 orang	5,5
7	Danau Sipin	17 orang	5,5
8	Danau Teluk	9 orang	3
9	Pelayangan	10 orang	3,26
10	Jambi Timur	81 orang	26,4
11	Kota Baru	11 orang	3,6
	Total	307 orang	100 %

Sumber : Kantor Bappeda Provinsi Jambi 2024

Berdasarkan Tabel 1.3 diatas persentase stunting di Kecamatan Kota Jambi, dengan total jumlah balita stunting sebanyak 307 orang yang tersebar di 11 Kecamatan. Kecamatan dengan jumlah dan persentase stunting tertinggi adalah Jambi Timur dengan 81 orang (26,4%), diikuti oleh Kecamatan Jelutung sebanyak 77 orang (25%), dan Pal Merah dengan 41 orang (13,4%). Sementara itu,

kecamatan dengan jumlah stunting terendah adalah Pasar Jambi sebanyak 7 orang (2,3%), Danau Teluk sebanyak 9 orang (3%), dan Pelayangan sebanyak 10 orang (3,26%). Data ini menunjukkan bahwa sebaran kasus stunting di Kota Jambi tidak merata, dengan konsentrasi tertinggi terjadi di wilayah Jambi Timur dan Jelutung, sehingga dua wilayah ini perlu menjadi prioritas dalam intervensi penanganan stunting.

Adapun distribusi balita stunting di Kota Jambi tahun 2024 menunjukkan bahwa sejumlah kecamatan mengalami peningkatan jumlah kasus stunting dibandingkan tahun sebelumnya, seperti Kecamatan Jambi Selatan (dari 15 menjadi 18 orang), Telanaipura (dari 14 menjadi 17 orang), dan Danau Sipin (dari 12 menjadi 17 orang). Namun demikian, Kecamatan Jambi Timur tetap mencatatkan jumlah balita stunting tertinggi, yaitu 81 orang, dengan salah satu wilayah terpadatnya yaitu Kelurahan Tanjung Pinang, yang menjadi titik konsentrasi kasus tertinggi menurut data internal Puskesmas wilayah tersebut (Bappeda, 2024).

Berdasarkan data dari Puskesmas Tanjung Pinang Jumlah kasus terbanyak tercatat, kasus stunting di Puskesmas Tanjung Pinang sebanyak 37 orang, sementara untuk keseluruhan dari Kecamatan Jambi Timur data dari Bappeda berjumlah 81 orang kasus stunting. Jadi ada perbedaan antara jumlah yang tercatat di Puskesmas Tanjung Pinang dengan tingkat Kecamatan dari kasus balita stunting.

Melihat kondisi ini, pemilihan Kecamatan Jambi Timur, khususnya Kelurahan Tanjung Pinang sebagai lokasi penelitian sangat relevan dan strategis. Pertama, karena wilayah ini merepresentasikan kondisi urban yang seharusnya memiliki akses lebih baik terhadap layanan kesehatan, namun tetap mencatatkan angka stunting tinggi. Kedua, dengan jumlah kasus terbanyak, Kelurahan Tanjung Pinang menjadi daerah prioritas untuk intervensi kebijakan dan program penanganan stunting. Ketiga, terdapat indikasi kenaikan jumlah keluarga atau anak yang berisiko stunting dibandingkan periode sebelumnya, yang menunjukkan bahwa intervensi yang dilakukan selama ini belum efektif sepenuhnya. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menggali lebih dalam faktor penyebab stunting.

Status sosial, demografi, dan ekonomi ada tiga komponen yang dapat mempengaruhi seseorang, tepatnya tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dan besaran pendapatan. Dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi berpeluang mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan pendapatan. Ketiga faktor ini saling berkaitan dalam menentukan status sosial ekonomi seseorang dalam suatu komunitas. Individu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki posisi yang lebih baik dengan penghasilan yang lebih besar, dibanding mereka dengan status sosial ekonomi, pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan yang lebih rendah (Hapsari, 2018).

Mayoritas responden dalam kelompok stunting memiliki pendapatan di bawah Upah Minimum Regional (UMR), dengan total 67 responden atau sekitar 35,8% dari keseluruhan responden. Sebaliknya, hanya sebagian kecil responden, yakni 45 orang atau sekitar 22%, yang pendapatannya di atas UMR. Seperti ini mengindikasikan bahwa kondisi ekonomi berperan signifikan dalam memengaruhi kejadian stunting (Wahyuni, 2020).

Meningkatnya pendapatan seseorang, mereka akan memiliki kesempatan mendapatkan makanan dengan kualitas dan kuantitas yang lebih baik. Sedangkan seseorang dengan penghasilan kurang mempunyai kemampuan untuk memperoleh makanan bergizi juga ikut berkurang. Namun, penghasilan yang tinggi tanpa disertai pemahaman yang cukup mengenai gizi dapat menyebabkan pola konsumsi yang cenderung konsumtif, di mana pemilihan makanan lebih didasarkan pada selera daripada nilai gizinya. Akibatnya, meskipun memiliki daya beli yang tinggi, tanpa pengetahuan gizi yang baik, pola makan yang diterapkan bisa menjadi tidak seimbang dan berisiko menimbulkan masalah kesehatan, seperti obesitas atau kekurangan nutrisi. Oleh karena itu, selain peningkatan pendapatan, edukasi gizi juga harus diperkuat agar masyarakat dapat memilih makanan yang tidak hanya enak, tetapi juga bergizi seimbang (Ramdhah, 2022).

Faktor demografi, sosial, dan ekonomi memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat prevalensi stunting, karena faktor-faktor ini memengaruhi kualitas asupan gizi, akses terhadap layanan kesehatan, serta pola asuh dalam keluarga. Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu mengenai pendidikan orang tua,

menunjukkan bahwa tingkat pendidikan orang tua, terutama ibu, berpengaruh signifikan terhadap kejadian stunting pada balita.

Penelitian oleh Dian Wahyuni dan Rinda Fithriyani (2020), Anindita (2012), Alemayehu (2015), Kismul (2018), serta Suyatno (2019) menyatakan bahwa ibu dengan pendidikan rendah cenderung kurang memahami pentingnya gizi dan pengasuhan yang benar, sehingga meningkatkan risiko stunting. Studi-studi ini menunjukkan bahwa pendidikan merupakan salah satu determinan paling konsisten. Dalam penelitian variabel pendidikan juga dijadikan fokus untuk menilai bagaimana latar belakang pendidikan keluarga penerima manfaat memengaruhi keberhasilan Program Percepatan Penurunan Stunting (PPPS). Bedanya, peneliti tidak hanya melihat efek pendidikan terhadap stunting secara langsung, tetapi juga terhadap efektivitas program intervensi.

Variabel pendapatan juga menjadi salah satu penentu utama dalam penelitian stunting. Studi seperti yang dilakukan oleh Rr. Dewi Ngaisyah (2015), Lia Agustin dan Dian Rahmawati (2021), serta Dwi Prasetyo Wati (2024) menyimpulkan bahwa keluarga dengan penghasilan di bawah UMR lebih berisiko mengalami stunting. Selain itu, pendapatan rendah mempersempit akses keluarga terhadap makanan bergizi dan layanan kesehatan. Didalam penelitian, pendapatan dianalisis tidak hanya sebagai penyebab stunting, tetapi juga sebagai faktor yang memengaruhi daya dukung keluarga dalam menjalankan anjuran dan pelayanan yang diberikan oleh program PPPS.

Beberapa penelitian, seperti oleh Rr. Dewi Ngaisyah (2015) dan Hortensia (2004), menunjukkan bahwa jenis pekerjaan, terutama pekerjaan informal seperti petani atau pekerjaan tidak tetap, berkaitan dengan tingginya risiko stunting. Namun, penelitian lain seperti Masayu Dian Khairani dkk (2024) justru menemukan bahwa pekerjaan ibu tidak berpengaruh signifikan. Tetapi dalam penelitian ini, pekerjaan dijadikan bagian dari indikator status sosial ekonomi untuk menganalisis kontribusinya terhadap keberhasilan pelaksanaan PPPS di tingkat rumah tangga.

Hasil penelitian yang berkaitan dengan jumlah anggota keluarga atau jumlah anak menghasilkan temuan yang bervariasi. Beberapa, seperti Wahyudi dkk

(2022) dan Fahmi Hafid (2024), menemukan bahwa semakin banyak anggota keluarga, semakin tinggi risiko stunting karena terbatasnya pembagian sumber daya. Namun penelitian seperti Intan Diah Pramithasari (2022) dan Masayu Dian Khairani (2024) tidak menemukan hubungan signifikan. Dalam penelitian, jumlah anggota keluarga dan beban tanggungan dimasukkan sebagai variabel demografi yang dikaitkan dengan keberhasilan program PPPS. Hal ini memperluas sudut pandang dengan melihat dampak beban tanggungan terhadap keberfungsian keluarga dalam menjalankan program intervensi stunting.

Berbeda dari sebagian besar penelitian terdahulu yang fokus pada hubungan antara faktor sosial ekonomi dan kejadian stunting, beberapa studi seperti oleh Nadia Hikmah (2024), Uliyah Helvia (2023), dan Kresnina (2024) telah menyoroiti efektivitas program PPPS secara langsung. Namun, fokus mereka lebih pada pelaksanaan program di tingkat institusional dan belum mengaitkannya secara mendalam dengan kondisi sosial ekonomi keluarga. Dalam penelitian, pendekatan yang digunakan lebih sistemik karena menilai hubungan antara variabel demografi, sosial, dan ekonomi keluarga terhadap keberhasilan program dari perspektif keluarga penerima manfaat. Ini merupakan kekuatan utama penelitian, yang menjadikannya berbeda dan lebih dalam konteks pengambilan kebijakan daerah.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dan penelitian peneliti, dapat disimpulkan bahwa penyebab utama stunting terbagi dalam tiga faktor, yaitu demografi seperti jumlah anggota keluarga, sosial seperti pendidikan ibu, serta ekonomi seperti pendapatan orang tua. Penelitian membedakan diri dengan menilai bagaimana ketiga faktor ini tidak hanya menyebabkan stunting, tetapi juga memengaruhi keberhasilan pelaksanaan Program Percepatan Penurunan Stunting (PPPS) di tingkat keluarga. Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada faktor demografi, sosial, dan ekonomi dalam menganalisis hubungannya dengan keberhasilan Program Percepatan Penurunan Stunting (PPPS). Berdasarkan pemaparan tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji **KONDISI DEMOGRAFI, SOSIAL, EKONOMI KELUARGA DAN HUBUNGANNYA DENGAN PROGRAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING (PPPS) DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS TANJUNG PINANG KOTA JAMBI**

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana kondisi demografi, sosial, dan ekonomi keluarga penerima manfaat Program Percepatan Penurunan Stunting (PPPS)?
- 1.2.2 Bagaimana hubungan antara kondisi demografi, sosial, dan ekonomi dengan tingkat keberhasilan penurunan stunting pada keluarga penerima manfaat Program Percepatan Penurunan Stunting PPPS?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- 1.3.1 Untuk menganalisis kondisi demografi, sosial, dan ekonomi keluarga penerima manfaat Program Percepatan Penurunan Stunting (PPPS).
- 1.3.2 Untuk menganalisis hubungan antara kondisi demografi, sosial, dan ekonomi dengan Tingkat keberhasilan penurunan stunting pada keluarga pemanfaat Program Percepatan Penurunan Stunting (PPPS).

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis:

Penelitian ini dapat berkontribusi dalam memperkaya referensi mengenai kebijakan kesehatan masyarakat, upaya penanggulangan stunting, dampaknya terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak serta dapat menambah wawasan terhadap studi-studi sebelumnya yang membahas peran faktor keluarga dalam mencegah stunting.

1.4.2 Manfaat Praktis:

Hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang berguna bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan Program Percepatan Penurunan Stunting (PPPS).